

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	11
1.4 Kegunaan Penelitian	13
1.5 Kerangka Pemikiran	14
1.6 Metode Penelitian	20
1.7 Lokasi Penelitian	22
1.8 Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
2.1. Pengertian Implementasi	26
2.2. Satuan Polisi Pamong Praja	29
2.2.1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja	29
2.2.2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja	32

2.3. Pedagang Kaki Lima	33
2.3.1. Pengertian Pedagang Kaki Lima	33
2.3.2. Jenis Sarana Berdagang Pedagang Kaki Lima	36
2.3.3. Karakteristik Lokasi Pedagang Kaki Lima	37
2.4. Jalan Perkotaan	40
2.4.1. Istilah Jalan Perkotaan	40
2.4.2. Karakteristik Jalan	42
2.4.3. Hambatan Samping	44
2.5. Ketertiban Umum	45
2.6. Sanksi Pidana Atas Perbuatan yang Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Jalan	49
2.7. Unsur-unsur Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
3.1. Hasil Penelitian	54
3.1.1. Implementasi Pasal 63 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang tentang Jalan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pangandaran.....	54

3.1.2.	Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Implementasi Pasal 63 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang tentang Jalan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pangandaran	60
3.1.3.	Upaya-upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Implementasi Pasal 63 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang tentang Jalan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pangandaran	62
3.2.	Pembahasan	64
3.2.1.	Implementasi Pasal 63 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang	

tentang Jalan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pangandaran.....	64
3.2.2. Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Implementasi Pasal 63 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang tentang Jalan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pangandaran	67
3.2.3. Upaya-upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Implementasi Pasal 63 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang tentang Jalan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pangandaran	71
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	75
4.1. Kesimpulan	75
4.2. Saran-saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP